

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Tinjauan Pustaka dalam edisi ini merupakan penjelasan lengkap tentang teori termasuk karya penelitian dari penulis, yang kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan sumber-sumber yang telah penulis telaah dalam karya tersebut. Penulis juga menggunakan tinjauan pustaka untuk membingkai pikiran dan merumuskan serta mengeksplorasi masalah.

Tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menjelaskan secara rinci variabel bebas dan terikat serta korelasi antara keduanya. Penulisan artikel ilmiah dalam hal ini disertai sangat dimudahkan dengan adanya literature review. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai publikasi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, sumber online, dan laporan resmi yang terkait dengan topik penelitian penulis.

Dalam hubungan bilateral ini yaitu kegiatan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh dua negara. Dengan adanya kemitraan strategis ini menjadi pilihan baru dalam menjalin hubungan bilateral di era seperti saat ini. Dan kesamaan tujuan strategis ini mendorong intensitas hubungan yang mendalam. Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai kerangka kerja untuk mengkategorikan informasi umum dan sumber data yang diteliti dalam penelitian ini. Dan dibawah ini adalah beberapa studi yang melihat hubungan kerjasama bilateral.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Triesanto Romulo Simanjuntak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Krsiten Satya Wacana. Yang berjudul **“Efektivitas Nation Branding “Wonderful Indonesia” Sebagai Sebuah Strategi Dalam Hubungan Diplomasi**

Pemerintah Indonesia Tahun 2011 – 2018” (Simanjuntak, T,R. 2019). Dalam penelitian tersebut menjelaskan, adanya pariwisata sebagai nation branding melalui “Wonderful Indonesia”. Hal ini dikarenakan sebagai industri jasa, sektor pariwisata memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan infrastruktur wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi devisa, Produk Domestik Bruto (PDB), membuka lapangan pekerjaan, serta pelestarian budaya dan sumber daya alam sebagai wujud rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar disaat ingin mempromosikan pariwisatanya melalui Nation Branding “Wonderful Indonesia”. Dalam ASEAN sendiri terdapat berbagai upaya untuk mempromosikan pariwisata negara-negara anggota sekaligus menjadikan ASEAN sebagai salah satu destinasi wisata dunia, salah satunya melalui Forum Pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Forum (ATF) yang mewadahi kesepuluh negara anggota ASEAN dalam memperkenalkan pariwisata dari negara mereka masing-masing. Selain itu juga ATF berperan untuk meningkatkan jumlah wisatawan di negara anggota ASEAN, memperkuat kerjasama antara ASEAN dan berbagai industri di sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang digunakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena kondisi geografis yang secara umum hampir sama membuat Indonesia harus lebih menggali dan mengeksplorasi pariwisata nasional. Nation Branding hadir sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, yang dalam penggunaannya negara harus memastikan keefektifan penggunaan Nation Branding tersebut. Sama halnya dengan Indonesia, pemerintah harus memastikan penggunaan Nation Branding “Wonderful Indonesia” telah efektif, sehingga dapat digunakan sebagai strategi diplomasi dengan negara lain. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan juga menggunakan metode

kepustakaan atau library research, dimana kelompok peneliti menggunakan sumber perpustakaan agar dapat memperoleh data untuk penelitian.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Tatik Erma Lestariningsih, Christy Damayanti, dan Halifa Haqqi. Yang Berjudul **“Wonderful Indonesia Festival 2015 Di Thailand Sebagai Diplomasi Kebudayaan Indonesia”** (Tatik Erma Lestariningsih, 2019). Dalam penelitian tersebut menjelaskan Wonderful Indonesia Festival sudah dilaksanakan di berbagai negara belahan dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, India dan baru – baru ini diselenggarakan di Thailand. Festival tersebut diselenggarakan di Thailand pada bulan November 2015 selama 7 hari di tempat keramaian Kota Bangkok seperti Platinum Fashion Mall dan Central World. Thailand menjadi salah satu tujuan promosi pariwisata Indonesia karena negara tersebut sudah lama menjadi mitra kerja Indonesia baik dalam hubungan bilateral maupun di ruang lingkup ASEAN. Selain itu, Thailand juga berpredikat sebagai negara favorit se-ASEAN yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara serta mengungguli kunjungan wisatawan ke Singapura dan Malaysia. Wonderful Indonesia Festival 2015 yang diselenggarakan di kota Bangkok sangat diminati oleh masyarakat baik masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara yang sedang berkunjung ke Thailand. Para pengunjung juga disuguhi dengan berbagai kesenian khas Indonesia seperti tari tradisional, kerajinan khas dari berbagai macam daerah di Indonesia, masakan khas Indonesia dan tidak lupa batik. Wonderful Indonesia Festival 2015 menjadi sarana berdialog bagi pengembangan pemahaman antar bangsa sehingga dapat dikembangkan rasa saling pengertian yang lebih baik. Keragaman adat budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu modal besar yang menjadi peluang Indonesia dalam memanfaatkan diplomasi budaya dengan melalui nilai - nilai kesenian. Contoh yang dimaksud misalnya saja jenis - jenis kesenian tari, ragam alunan musik khas tradisional daerah dan sebagainya. Melalui pemanfaatan kesenian - kesenian tersebut

dapat menjadi instrumen dalam membangun kedekatan emosional antar negara yang lebih harmonis. Thailand yang merupakan negara favorit wisatawan mancanegara telah menjalin kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. Salah satunya pada bidang sosial budaya. Di bidang sosial dan budaya, beberapa perguruan tinggi di Thailand yang memiliki program pengajaran bahasa Indonesia. Selain itu, KBRI Bangkok, Thailand juga membuka kelas untuk masyarakat atau mahasiswa yang ingin belajar bahasa Indonesia setiap satu minggu sekali. Berbagai kerjasama promosi kebudayaan dan pariwisata secara rutin dilaksanakan antara Pemerintah RI khususnya pemerintah daerah dengan pemerintah Thailand, lembaga-lembaga Thailand yang bergerak dibidang kebudayaan. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Thailand melalui Wonderful Indonesia Festival 2015 adalah hasil dari hubungan bilateral yang harmonis antara kedua negara tersebut. Dengan terjalinnya kerja sama antara Indonesia dengan Thailand, khususnya dalam bidang sosial budaya, maka penerapan diplomasi kebudayaan Indonesia di Negara Thailand direalisasikan. Elemen-elemen kebudayaan yang digunakan dalam praktek diplomasi kebudayaan telah dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan kebudayaan yang beraneka ragam. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pun yaitu data primer dan sekunder, yang berasal dari buku atau literatur, artikel, situs – situs resmi mengenai kedua negara dan beberapa situs resmi lainnya yang berhubungan dengan tema dan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Refa Lina Tiawati R, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumatera Barat. Yang berjudul **“Bahasa Indonesia di Thailand Menjadi Media Diplomasi Kebahasaan dan Budayadi ASEAN Melalui Pengajaran BIPA”** (R,R,L. 2016). Dalam penelitian ini menjelaskan, untuk memperkenalkan dan

mengkonsolidasikan bahasa Indonesia ke dunia dan tingkat ASEAN, ada beberapa pilihan, tapi mengajar dan menguasai Bahasa Indonesia (BI). Melalui pengajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA), itu bisa menjadi media bahasa dan diplomasi budaya dan membawa bahasa Indonesia sebagai lingua franca di masyarakat ASEAN, seperti terjadi di Thailand. Oleh karena itu, beberapa upaya perlu dilakukan untuk menyadari bahwa melalui pengajaran BIPA. untuk meningkatkan minat belajar BI di luar negeri, untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai bangsa dan membuat BI sebagai Lingua franca, yang 1. Sistem BIPA mengajar di luar negeri, 2) materi BIPA, pembelajaran BIPA tidak selalu mengajarkan orang tentang bahasa tetapi juga mencakup materi tentang budaya dan sastra Indonesia. 3) tujuan pengajaran BIPA, untuk mempersiapkan bahasa Indonesia to be lingua franca dalam komunitas ASEAN. Konsep BI sebagai media diplomasi sosial budaya dan komunikasi dalam komunitas ASEAN melalui pengajaran BIPA secara terarah dapat dijadikan wacana baru dan ditekankan dalam pengajaran BIPA. Sebagai orang baru dalam pengajaran BIPA, penulis megarapkan bagaimana wacana ini dapat membangkitkan semangat para ahli bahasa, pemerintah dan anak bangsa Indonesia dalam menyikapi hal ini. Adakah kesadaran bahwa BI adalah milik kita dan tanggung jawab kita, hal ini tampaknya belum merata dimiliki seluruh warga negara. Tidak salah, jika dikatakan bahwa nasionalisme kita dalam berbahasa masih sangat tipis. Kepekaan kita terhadap bahasa yang kita pakai selama ini belum terlihat nyata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dari pemikiran-pemikiran yang timbul atas dasar pengalaman praktis penulis saat ini. Dalam kaitan BI, BIPA dan ASEAN penulis akan mencoba menguraikan pemikiran bagaimana meningkatkan minat belajar BI di luar negeri, memperbaiki citra bangsa Indonesia dan mungkin upaya menjadikan BI menjadi bahasa lingua franca di ASEAN. Hal ini penulis maksudkan agar dapat diperoleh sebuah garis temu dari suatu opini (cita-cita) dan fakta yang disatukan oleh BI.

Keempat, penelitian dari buku Elisabet Carbó-Catalan & Diana Roig-Sanz. Yang berjudul **“Culture as Soft Power_Bridging Cultural Relations, Intellectual History and Cultural Diplomacy”** (Elisabet Carbo, 2022). Dalam buku ini penjelesan dari point pertama yang berkaitan dengan penelitian yang ambil yaitu, Hubungan Budaya Internasional, Sketsa sejarah dan isu-isu konseptual baru Sejarah Hubungan Internasional (antara dua perang dunia) dan Hubungan Budaya Internasional (ICR) baru-baru ini hanya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1980-an, yang menyaksikan "pergeseran budaya dalam HI". Ideologi, produksi dan sirkulasi budaya, opini publik) dipelajari sebagai aspek penting dari bidang kegiatan HI, karena mereka adalah instrumen diplomasi. kekuasaan/pengaruh. Penelitian sebelumnya sangat langka (McMurry et al. 1947; Thomas dan Laves 1963), tetapi pada tahun 1960-an dua mantan praktisi memulai refleksi politik di bidang politik di Prancis dan Amerika Serikat (Coombs 1964; Balous 1970). dalam konteks pasca-Perang Dingin. Tahun 1980-an dan 1990-an juga dikaitkan dengan percepatan baru globalisasi sosial dan peningkatan proses pertukaran dari semua jenis, yang semakin menghindari mekanisme elitis diplomasi budaya yang didirikan pada akhir abad ke-19. Pengamatan terhadap peresmian masyarakat internasional oleh fenomena politik-budaya transnasional (migrasi pertama-tama) dengan demikian memunculkan pendekatan baru terhadap sejarah HI pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, yang sangat memadukan semua manifestasi Budaya (termasuk khususnya olahraga, pariwisata, dan bahkan aspek teknologi) dan Hubungan Internasional (Gienow-Hecht dan Schumacher 2003); Kebudayaan (di samping ekonomi atau kekuatan militer) kemudian menjadi bidang studi yang agak sistematis, tidak lagi dianggap hanya dalam hal pertukaran budaya resmi (mahasiswa dan profesor, dari berbagai produksi budaya) tetapi juga sirkulasi kompleks individu dan konten budaya di luar. kerangka diplomasi negara. Kami akan mencoba memberikan gambaran tentang historiografi ICR, dengan fokus pertama pada pendekatan tertua, terkait dengan

historiografi nasional yang berbeda, di sekitar gagasan diplomasi budaya (Euro-historiografi pean/kacang) dan diplomasi publik (historiografi Amerika). Kami kemudian akan melihat unsur-unsur pembaruan historiografi di bawah pengaruh, di atas segalanya, dari "giliran transnasional" (kadang-kadang juga disebut sebagai "sejarah diplomatik baru") yang sangat merelatifkan dimensi statosentris dari Hubungan Internasional.dengan menekankan aktor transnasional swasta. Akhirnya, kami ingin mengakhiri presentasi ini dengan catatan yang lebih teoretis dengan kembali ke konseptualisasi Joseph Nye tentang "Soft Power" dan pemikiran "konstruktivis" tentang norma untuk (kembali) memikirkan bidang hubungan internasional (beberapa ahli teori HI berbicara dari "global"kerangka kerja yang melampaui tatanan antar negara) hari ini. Kedua pendekatan ini tampaknya membantu mencerminkan lebih kuat konteks budaya baru globalisasi sejak tahun 1980-an.Istilah "makna" diperlukan dalam pandangan orang lain dalam budaya koneksi. Di dunia di mana konsep nilai dan identitas semakin ditekankan. Kebijakan budaya eksternal harus benar-benar mempertimbangkan hal ini.Lalu dari point yang kedua yaitu, Diplomasi Budaya dan Diplomasi Publik, Dua Bentuk Aksi Budaya Eksternal.Lanskap ICR telah kaya selama 40 tahun terakhir. Studi kasus berlimpah, tetapi integrasi jarang terjadi (lihat Dulphy et al. 2010). Albert Salon mempertahankan makalah tentang diplomasi budaya Prancis (akhir abad kesembilan belas hingga 1970) pada tahun 1981, dan Richard T. Arndt menerbitkan penilaian yang cukup lengkap tentang aktivitas budaya Amerika abad kedua puluh pada tahun 2006 (Salon 1981; Arndt 2006). Itu juga perlu dicatat bahwa sebagian besar karya ditulis oleh sejarawan; tetapi untuk periode terakhir, ada karya sosiolog dan ilmuwan politik, yang terutama didasarkan pada materi lisan yang menarik (lihat, misalnya, Grémion dan Chenal 1984; Leclerc 2019). Dengan pengecualian beberapa karya tentang sejarah organisasi budaya internasional, seperti kerjasama intelektual dalam Liga Bangsa sebelum 1940 atau Unesco setelah 1945 (Renoliet 1999; Maurel 2010),

organisasi yang mempromosikan "internasionalisme budaya" (Iriye 1997), studi berfokus pada "diplomasi budaya" (istilah Francis) atau "kebijakan budaya asing" (Jerman terminologi) yang dilakukan oleh Negara. Hal ini dapat didefinisikan, menurut Milton Cummings, sebagai "pertukaran ide, informasi, produksi seni, dan aspek budaya lainnya antar negara dalam rangka meningkatkan saling pengertian". Didefinisikan dengan cara yang agak kabur oleh para praktisi (yang juga merupakan teoris pertama) dan juga oleh para sejarawan, diplomasi pertukaran budaya Eropa sebenarnya telah mengambil tiga jalur tindakan, sangat berbeda (bahkan kontradiktif) satu sama lain: penyebaran (abad kesembilan belas-1950-an), kerjasama (sejak 1960-an), timbal balik (sejak 1990-an). Definisi yang sangat kabur ini juga memiliki alasan politis sejauh tujuan sebenarnya dari penyebaran budaya jelas bersifat politis, dalam hal pengaruh strategis. Diperdebatkan, konsep diplomasi budaya, karena ketidaktepatan yang disengaja dalam terminologi, juga memungkinkan penyempurnaan proyek pengaruh lainnya. Finalitas politik ini juga sebagian besar didepolitikasi oleh pilihan perilaku dan pertukaran budaya dari penjelasan dari kedua point tersebut memiliki kesimpulan yaitu menarik perbedaan tajam antara budaya dan hubungan politik, dengan beberapa kepentingan penelitian menunjuk pada pertemuan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara budaya dan politik di arena internasional. Saya telah menguraikan aspek-aspek yang mengaburkan. Diplomasi dan kerjasama intelektual. Tak perlu dikatakan, masih belum banyak literatur yang membahas ketiga aktivitas dan persinggungannya, tetapi hubungan erat dan saling ketergantungannya tidak dapat disangkal, membuat kita percaya bahwa masih ada ruang untuk sejarah hubungan budaya yang saling terkait, diplomasi budaya dan kerjasama intelektual. Buku ini mengundang pembaca yang ahli di salah satu bidang di atas Non-disiplin yang mengeksplorasi penggunaan budaya asing di panggung internasional, dari hubungan budaya internasional hingga studi penerjemahan, atau untuk

memikirkan kembali kegiatan, institusi, peristiwa, dan aktor di persimpangan politik dan budaya dalam sifat berwajah bermuka dua. Tujuan kami adalah untuk menyusun serangkaian studi kasus yang mendorong dialog interdisipliner antara disiplin di atas. Konsep institusi adalah kunci pilihan mereka, karena mereka memahami bahwa institusionalisasi menyiratkan keinginan untuk kontinuitas dan sistematisasi. Dengan berfokus pada dampak upaya mereka di bidang sosial, baik dengan fokus budaya atau politik, kami telah mendorong narasi yang melampaui akun internalis lembaga-lembaga ini. Pada inti dari perspektif interdisipliner kami, kami telah menempatkan konsep soft power, sebuah konsep yang memungkinkan kita untuk mengkonseptualisasikan potensi budaya secara politik dan internasional. Kami menggunakan istilah ini untuk memahami bagaimana aktivitas budaya melegitimasi komunitas tertentu tidak hanya di ranah budaya, tetapi juga di ranah politik melalui tindakan asing. Ini menolak konsep lain seperti branding nasional dalam ilmu pemasaran dan politik (Braber et al. 2021) dan arti-penting yang diterapkan pada studi sastra (Koegler 2018; Lanzendörfer dan Norrick Rühl 2020). Mereka mendiskusikan hubungan antara kekuasaan dan budaya, dan menawarkan kemungkinan pemahaman yang lebih baik tentang proyeksi dan perilaku budaya asing Fungsi politik budaya dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan Memperluas dimensi analitis kegiatan proyeksi budaya dari perspektif politik dan budaya Aspek budaya diplomasi budaya dan kerjasama intelektual, dan dimensi politik hubungan budaya juga harus fokus pada aktor yang terlupakan atau diabaikan. Faktanya, sebagian besar peneliti yang mempelajari kerjasama intelektual dan diplomasi budaya berfokus pada “pusat” produksi budaya (Paris, London, Namun, peran dari daerah lain, modal budaya, dan aktor-aktor yang seolah-olah mendukung tidak diikutsertakan. Sejarah yang terdesentralisasi dimungkinkan dengan berfokus pada objek dan aktor baru, tetapi seperti yang disarankan oleh Bilotto (2020), apa yang disebut sejarah dalam arsip yang sangat tersentralisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa Hal ini juga

dimungkinkan dengan melihat hal-hal yang bersifat peripheral, marginal, atau tidak signifikan. Di cakrawala yang sama desentralisasi, kami telah menyusun daftar yang terkenal dalam buku ini. (U. of Paris Nanterre, CONICET, U. of Lausanne, U. de Colima, Sorbonne Nouvelle, U. de Chile, U. of Reading, U. Pompeu Fabra, U. Oberta de Catalunya, U. Complutense de Madrid, U. de la República, U. de Girona, U. of Wuppertal, U. of Oslo, Instituto Caro y Cuervo, dan KU Leuven) dan asal geografis (Prancis, Argentina, Swiss, Meksiko, Chili, Inggris, Spanyol, Uruguay, Jerman, Kolombia, dan Belgia). Dengan keragaman ini, kami bertujuan untuk menyatukan para peneliti yang bekerja di berbagai wilayah dan lembaga untuk mendiversifikasi asal-usul hasil ilmiah kami dan untuk melibatkan para peneliti di berbagai tahap karir mereka. Dunia teori menghaluskan keragaman yang sebenarnya ada, jadi saya berpendapat bahwa kompleksitas perlu diakui dan diperdebatkan karena kemajuan kognitif tidak dapat bergantung pada generalisasi praktik-praktik tertentu cendekiawan dengan afiliasi beragam.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dalam melakukan proses penelitian, kerangka penelitian juga harus ditinjau dengan memperkuat argumen atas Analisa dan juga berpacu pada landasan dasar juga analisa penulis. Sehingga untuk menganalisis masalah yang diangkat, penulis mencoba untuk memaparkan landasan teori terkemuka dari permasalahan yang sedang diangkat sehingga korelasinya mampu menghasilkan teori yang relevan. Kerangka acuan yang dibutuhkan oleh penulis ini mampu membantu penulis dalam memahami dan menganalisis problematika yang telah ditentukan. Karena itu penulis berpacu kepada teori -teori terkemuka yang memiliki hubungan dengan problematika yang diambil serta sebagai pedoman dalam menganalisis suatu objek penelitian.

2.2.1 Hubungan Internasional

Menurut Mochtar Mas'od, studi hubungan internasional mempelajari pola interaksi atau perilaku internasional, keduanya aktor negara dan non-negara. Pelajari tentang fenomena Hubungan Internasional, seperti negara-bangsa, kita harus menyederhanakannya dengan pembentukan konsep. Mengingat pertanyaan tentang bagaimana negara membentuk dan mempertahankan keberadaannya, mungkin dalam perilakunya di luar negeri. Negara apa yang terkait dengannya, bagaimana pengaruhnya atau dipengaruhi oleh sistem internasional yang melingkupinya, dan sebagainya. Pertama-tama kita harus memahami arti negara, politik Sistem asing, internasional dan sebagainya. Kita harus membuka komponen kehidupan sosial, sehingga kita dapat memahami bagus. (Mas'od, 1990)

Bull (1995: 181-182) mengemukakan bahwa teori hubungan internasional bisa dipahami sebagai sekumpulan proposisi-proposisi umum yang dikemukakan mengenai politik global/dunia (world politics). Proposisi tersebut mencakup proposisi-proposisi normatif, yang menyatakan konsiderasi-konsiderasi moral ataupun legal yang dapat diaplikasikan dan juga proposisi-proposisi positif yang mendefinisikan atau menjelaskan karakter aktualnya. Teori hubungan internasional meliputi teori-teori komprehensif yang mendeskripsikan atau menentukan politik internasional secara keseluruhan, tetapi juga teori-teori parsial yang hirau dengan beberapa elemen politik internasional semisal perang atau damai, strategi atau diplomasi.

Selanjutnya Bull juga mengemukakan bahwa teori hubungan internasional juga meliputi teori tentang masyarakat internasional atau system internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit (negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia (world politics), termasuk juga teori mengenai unit-unit itu sendiri. (Dugis, 2016)

Peperangan antar bangsa-bangsa disatu sisi dan keinginan orang untuk hidup damai telah mendorong para ilmuwan ketika itu untuk mengajukan pemikiran teoritik di bidang hubungan internasional. Pemikiran yang diajukan berlandaskan pada hujjah (alasan) bahwa peperangan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, dan merupakan dosa dan musibah yang terjadi akibat ketidak sengajaan. Peperangan antar bangsa terjadi adalah akibat prasangka yang muncul dalam menafsirkan keamanan yang mendorong orang mengembangkan senjata sehingga pada akhirnya manusia terjebak dalam perang.

Hedley Bull, salah satu pemikir saat itu, berpendapat bahwa sistem hubungan internasional yang menciptakan Perang Dunia I secara de facto pada dasarnya dapat diubah menjadi keadaan yang lebih menguntungkan perdamaian, di bawah pengaruh kebangkitan demokrasi, perkembangan gagasan dunia, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, kerja bagus di Perdamaian disebarkan melalui pengajaran atau pendidikan. (M.Saeri,2012)

Dengan teori ini, bisa mendorong analisis hubungan antara Indonesia dan Thailand dan produksi kerjasama melalui aspek budaya dilakukan dengan aktor negara atau non negara.

2.2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Hal tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan bernegara yang semakin kompleks. Sebenarnya, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya.

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktoraktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi regulasi, norma-norma, dan prosedur - prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi.

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masingmasing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil

yang 34 menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.

Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama seperti :

- a. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
- b. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
- c. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan sebagainya nilainya
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Secara lebih jelas Koesnadi Kartasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai “Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.

Dalam suatu kerjasama internasional berdampak pada bertemunya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam

negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor :

- a. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
- b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
- c. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
- d. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Selain itu pun, adanya tiga tingkatan dalam kerjasama internasional yaitu :

- a. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
- b. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara

negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.

- c. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.

Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Peter toma dan Robert Gorman, diantaranya :

- a. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama di pandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.
- b. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai.
- c. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.
- d. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus,

berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini.

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama internasional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh negara untuk menjalin hubungan antar negara. Bentuk kerjasama internasional dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Dan dalam skripsi ini akan berfokus pada kerjasama bilateral. Kerjasama Bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan hanya dua negara. Upaya dalam menjalani kerjasama bilateral dapat melalui berbagai macam bidang. Salah satunya bidang kerjasama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah berfokus pada bidang sosial dan budaya.

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara.

Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang Variabel-Variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.

- b. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan
- e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan.

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan kedua negara dan untuk mencapai tujuan bersama. Bilateralisme berpacu pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara, contohnya :

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Tukar menukar Duta Besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*). Kerjasama dapat berjalan melalui berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan interaksi berbentuk kerjasama terjadi pada dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Model kerjasama lainnya dilakukan oleh masing-masing negara yang diwadahi organisasi dan perjanjian internasional.

Beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu

masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

Pola kerjasama bilateral meliputi proses:

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan.
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi.

Isu utama dalam kerjasama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.

Jadi, kerjasama tidak dapat terjadi apabila suatu negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Sehingga yang terasa bahwa kerjasama akan tercipta, karena adanya ketergantungan dari masing-masing negara untuk mencapai kepentingan internalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.

Menurut, Kishan S. Rana mengatakan bahwa kerjasama bilateral: “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara”.

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

2.2.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara bangsa (*Nation State*) masih merupakan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negara - negara menjalankan hubungan internasional (*International Relation*) adalah kepentingan nasionalnya.

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya. Kedua, perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezimekonomi dan politiknya. Ketiga, perlindungan terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara adalah hasil yang dibuat oleh para pengambil kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa.

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, Kekuasaan (power) dan Kepentingan (interest), sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, kemudian konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya.

Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu "power" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional. Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain – lain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana.

Menurut para penganut realis yang mendefinisikan dari kepentingan nasional adalah sebagai berikut: “Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah

segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional”

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (power). Namun kapabilitas ini merupakan definisi power yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

2.2.5 Diplomasi

Menurut Barston yang dikutip oleh Djelantik Sukarwarsini definisi diplomasi ialah sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang

lebih luas yang dilakukan melalui korespondens, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Sebuah definisi yang dimana, diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang di formulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi” untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Diplomasi merupakan proses untuk melakukan komunikasi antar negara melalui jalur-jalur resmi perwakilan juga mengalami perubahan. Dengan meningkatnya peran aktor non state dalam hubungan internasional, diplomasi mengalami perubahan dari yang semula bersifat state centric menjadi bervariasi derajatnya. Dari state centric hingga yang berorientasi antar warga negara.

Diplomasi adalah suatu sistem komunikasi antarbangsa-bangsa, dengan melalui sistem komunikasi seperti ini, maka negara-negara dapat mengekspresikan dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Diplomasi merupakan saluran penghubung (*channel of contact*). Diplomasi juga dapat dijadikan suatu proses. Diplomasi sebagai sarana di mana, masalah-masalah yang kiranya timbul dalam rangkaian hubungan antar negara tersebut, dapat di pecahkan dengan negosiasi dan bargaining. Selain itu, diplomasi dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara-negara yakni dalam bentuk perselisihan-perselisihan, konflik-konflik, pertikaian-pertikaian, ataupun dalam suatu konflik.

Diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Suatu tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri. Tujuan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasional dengan merubah sikap dan tingkah laku lawannya. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan diplomasi akan tergantung tidak hanya pada manajemen hubungan internasional yang dilakukan

oleh para diplomat yang ditempatkan di luar negeri, tetapi juga tergantung pada arahan Menlu atau Direktur Jendral.

Diplomasi adalah upaya dengan melakukan suatu aktivitas berupa cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil yang ditunjukkan secara resmi, melakukan suatu dialog dalam suatu pertemuan dengan adanya koordinasi satu aktor dengan aktor lainnya, ataupun lebih dari dua aktor yang didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan berupaya untuk mencapainya. Aktivitas tersebut dalam bentuk pembicaraan secara pribadi dengan mengadakan pertukaran pandangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan bahkan sering dengan ancaman-ancaman dan kegiatan yang berhubungan lainnya.

Salah satu perkembangan khusus metode diplomasi adalah meningkatnya jumlah aktivitas-aktivitas diplomasi seperti pertemuan, kunjungan, negosiasi dan penandatanganan traktat. Salah satu bentuk penting perjanjian internasional adalah meningkatnya pemakaian instrument-instrumen informal seperti Gentleman Agreement (GA) dan Memoranda of Understanding (MoU). Penerapan kesepakatan-kesepakatan tersebut merefleksikan peningkatan hubungan antara departemen-departemen dalam pemerintahan dengan aktor-aktor diplomasi pada level internasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

2.2.6. Hubungan Indonesia dan Thailand

Hubungan antara Indonesia dan Thailand telah terjalin selama ratusan tahun melalui ikatan antara kerajaan-kerajaan Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Hal itu disampaikan Dubes Rachmat Budiman dalam wawancara khusus dengan Harian Tribun pada 24 Mei 2021.

Hubungan ini antara lain ditunjukkan dengan adanya sebutan khusus Indonesia oleh warga negara Thailand. Misalnya Inao untuk Indonesia dan Sriwichai untuk sebutan Kerajaan Sriwijaya. Apalagi peninggalan Al-Qur'an yang ditulis dalam bahasa Jawa Thailand, yang ada sejak abad ke-16, adalah bukti dari hubungan ini, hubungan diplomatik Indonesia dengan Thailand resmi dimulai pada tanggal 7 maret 1950. Wawancara tersebut juga menjelaskan asal mula kehadiran Indonesia di Thailand, seperti pada tahun 1656 ketika Raja Narai dari Thailand membawa orang-orang dari Bugis dan Makassar, yang terkenal dengan keberaniannya, untuk mengikuti pelatihan instruktur Royal Guard. Sementara itu, ketika Raja Rama V kembali ke Thailand dari tiga kunjungan ke Indonesia, ia menunjuk seorang tukang kebun Indonesia sebagai penjaga kebun Kerajaan Thailand. Ada juga catatan kedatangan orang Indonesia ke Jepang, seperti Romusha yang dibawa tentara Jepang, kelompok pencak silat, dan mantan KNIL. Orang Indonesia di Thailand, termasuk keturunannya, kini sebagian besar adalah warga negara Thailand.

2.2.7 Kerjasama Budaya Indonesia dan Thailand

Indonesia dan Thailand perlu lebih memperkuat kerja sama budaya. Apalagi mengingat budaya telah terbukti menjadi media terbaik untuk meningkatkan people-to-people contact, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dengan Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan kuno Thailand. Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat

Budiman saat bertemu dengan Menteri Kebudayaan Thailand Itthipol Kunplome di Kediaman Menteri di Bangkok pada Selasa 6 Oktober 2021. Dubes RI Rachmat Budiman mengatakan, “Selama ini media budaya menjadi jembatan untuk meningkatkan saling pengertian antara kedua negara, Dubes Rachmat Budiman dan Menteri Itthipol membahas berbagai kerjasama budaya yang telah berjalan dengan baik selama ini kami juga membahas peluang yang digunakan untuk memperkuat kerjasama melalui inisiatif baru dengan memanfaatkan kreativitas nasional yang dikembangkan, Itthipol juga mengatakan kedua negara memiliki banyak cara dan kemungkinan yang dapat terus mereka jajaki untuk mendekatkan persahabatan dan kerja sama. Kesamaan dalam berbagai aspek budaya yang ditunjukkan Indonesia dan Thailand merupakan prasyarat yang sangat baik untuk kerjasama budaya. Kolaborasi Indonesia-Thailand hingga saat ini, termasuk keberhasilan *Ramayana Two Nations One Dance* pada 24 September 2020, melambangkan persahabatan erat kedua negara. Dalam konferensi tersebut, selain kerja sama di bidang kebudayaan, dengan fokus pada seni dan budaya, juga dibahas tentang kerja sama di bidang pendidikan, dengan fokus pada pertukaran pelajar melalui program beasiswa. Dalam hal ini, Dubes Rachmat Budiman secara khusus menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia secara rutin memberikan beasiswa seperti Darmasiswa dan Beasiswa Seni Budaya Indonesia, yang selama ini diterima dengan baik oleh generasi muda Thailand. Menteri Itthipol mengucapkan terima kasih atas pemberian beasiswa kepada pelajar Thailand dan percaya bahwa ini akan membantu memperkuat hubungan dan kerja sama antara kedua negara di masa depan. Menteri Itthipol mengatakan pemerintah Thailand secara rutin memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari negara-negara ASEAN, dan tentunya mahasiswa Indonesia juga memanfaatkan beasiswa tersebut. Terkait kerjasama pendidikan, berbagai skema beasiswa melalui program antar universitas dan kerjasama antar organisasi masyarakat di kedua negara juga dibahas. Menutup diskusi, Dubes RI

menyambut baik dukungan Menteri Itipol terhadap rencana KBRI Bangkok menyelenggarakan Trade, Tourism, Investment and Culture Forum (TTIC) pada 16-18 September 2022.

2.2.8. Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya adalah Salah satu bentuk dari soft power diplomacy, bagian dari diplomasi publik yang dilakukan suatu negara untuk memajukan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Diplomasi budaya memiliki banyak segi, termasuk seni, bahasa, dan informasi.

Kebudayaan dapat, meringankan situasi yang sulit, gagasan interaksi budaya orang-ke-orang, menciptakan interaksi yang lebih menarik dan interaktif. Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Biro Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek. Selain menjelaskan konsep *wellness economy*, Dr. Hilmer juga mengumumkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan saluran diplomatik *diversitas.id* dan majalah Indonesia sebagai alat komunikasi untuk mempromosikan budaya Indonesia. Sementara itu, Dr. Teuku Faizasyah, Direktur Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu sebagai *keynote speaker* selanjutnya mengatakan, dalam konteks pandemi saat ini, Kemlu telah meluncurkan program beasiswa online untuk seni dan budaya Indonesia. .dikatakan telah dimulai. Diplomasi Budaya mempromosikan budaya sebagai salah satu merek dagang terpenting Indonesia di luar negeri, menurut Direktur Eksekutif IDP. Tantangan bagi Indonesia adalah banyaknya aset budaya yang ingin dipromosikan sebagai titik masuk untuk penyeimbangan spektrum.

Meski tidak ada pusat kebudayaan di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara konsisten mempromosikan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan, kondisi dan kebutuhan negara-negara yang terakreditasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa diplomasi budaya tidak memiliki peluru perak.

Diplomasi budaya orang-ke-orang menciptakan koneksi dan membuka jalan bagi perdamaian global dan ekonomi kesehatan melalui promosi pariwisata dan investasi. Diplomasi soft power melalui budaya menerapkan prinsip pemasaran sesering yang diinginkan “pelanggan” adalah salah satu elemen kunci dalam menumbuhkan rasa persaudaraan, termasuk beberapa kesimpulan Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan kementerian. Yayan Ganda Hayat Mulyana, Luar Negeri, Republik Indonesia

2.2.9. Acara Pertunjukan Sendratari Ramayana Two Nations: One Dance

(Bangkok, 24 September 2020) KBRI Bangkok bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Thailand memfasilitasi pertunjukan Ramayana virtual bersama di National Theatre of Thailand. Bangkok pada 24 September 2020. Acara dengan moto "Dua Bangsa: Satu Tarian" ini memukau 400 penonton. Penonton terdiri dari pejabat pemerintah Thailand, kalangan diplomatik, akademisi, media, teman-teman Indonesia, dan warga Indonesia Thailand.

Pertunjukan tersebut merupakan bagian dari peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand tahun ini. Kontak budaya sudah ada jauh sebelum tahun 1950, ketika Indonesia dan Thailand secara resmi memulai hubungan diplomatik dan kerjasama. Sejarah Ramayana yang dimiliki oleh kedua negara merupakan bukti nyata dari sejarah panjang ikatan budaya mereka. Menteri Kebudayaan Thailand Ittiphol Khunpluem menegaskan bahwa tarian virtual bersama ini baru pertama kali diadakan oleh Thailand dan negara sahabat. Kegiatan ini semakin mempertegas persatuan erat antara Indonesia dan Thailand dan berdampak pada penguatan komunitas ASEAN. Kegiatan budaya ini diyakini akan terus menginspirasi masyarakat kedua negara untuk melakukan kegiatan bersama, berbagi ilmu antar lembaga, serta tumbuh dan sejahtera bersama.

Dalam pesan video di awal acara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menegaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak menghentikan upaya bersama kedua negara untuk memberikan yang terbaik. menampilkan berbagai kolaborasi, termasuk implementasi tari Ramayana virtual bersama. Ia juga menekankan bahwa seni melampaui batas-batas budaya, sebagaimana tercermin dalam upaya kedua negara untuk lebih memajukan budaya dan seni. Seni juga menyatukan kita untuk membuat orang menjadi manusia, menginspirasi kita di masa-masa sulit, dan membimbing kita ke arah yang lebih baik.

Dengan motto "Dua Bangsa, Satu Tari", mempromosikan seni dan budaya Indonesia dan Thailand melalui pertunjukan bersama tari Ramayana menunjukkan kesamaan akar budaya kedua negara dan semakin mempererat hubungan baik kedua negara akan futuristik.

“Indonesia dan Thailand harus bisa membina dalam persahabatan yang cukup lama ini, hal yang paling utama ialah dalam konteks pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dan meningkatkan saling pengertian dan pemahaman antara kedua komunitas tersebut,” kata Dickie Komar dari KUI. KBRI Bangkok dalam sebuah wawancara setelah pertunjukan spektakuler. Tari Ramayana Indonesia dibawakan secara virtual oleh Grup Wayang Bharata Jakarta dan Paripurna Bali. Sementara itu, tarian Thai Ramayana dibawakan secara langsung oleh rombongan tari Kementerian Kebudayaan Thailand. Kolaborasi tari kedua negara ini disajikan dengan apik dan menceritakan kisah lengkap perjuangan Sri Rama untuk membawa Dewi Shinta kembali ke Ayodhya.

Selain mempromosikan budaya dan seni, KBRI Bangkok mempromosikan masakan Indonesia dengan menyajikan jajanan tradisional seperti Dadar Gurung, Lumpia Semarang dan Komburo kepada para peserta. Merupakan sajian yang menyemarakkan kegiatan pertunjukan dan

kemeriahan penonton saat itu. “Tarian dan makanan tradisional ini membawa kembali kenangan kunjungan saya ke Indonesia.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi yang telah dipaparkan diatas, yang mana landasan bagi penarikan hipotesis, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: **“Keberhasilan Penyelenggaraan Acara Sendratari Ramayana Two Nation One Dance Dapat Menjadi Model Bagi Penyelenggraan Event/Acara Sejenis Dalam Rangka Semakin Meningkatkan Kerjasama Budaya Indonesia dan Thailand**

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam hipotesis (Teoritik)	Indikator (empiric)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel bebas : Kerjasama hubungan bilateral Indonesia dan Thailand ini yang sangat berpengaruh dalam berjalannya Acara Pertunjukan Sendratari Ramayana Two Nations One Dance</p>	<p>1. Adanya perhatian dari KBRI Bangkok dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Kementrain Thailand yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Virtual Ramayana Joint Performance di Teater Nasional Thailand</p> <p>2. Upaya dalam menegaskan</p>	<p>Mengenai penetapan kerjasama hubungan bilateral, tentang Two Nations, One Dance: Gelaran Dua Budaya dalam Sendratari Ramayana yang dilakukan dengan cara adanya live broadcast melalui youtube dan facebook</p>

	<p>dekatnya rasa persatuan Indonesia dan Thailand dan menginspirasi semakin kuatnya <i>ASEAN Community</i> dari acara pagelaran tersebut.</p>	
<p>Variabel Terikat : Indonesia dan Thailand telah mempererat persahabatan yang telah terjalin 70 tahun</p>	<p>Upaya kerjasama hubungan bilateral dalam melaksanakan kegiatan pagelaran yang sedang berlangsung</p>	<p>Langkah yang dilakukan kedua negara tersebut dengan cara membuat suatu kegiatan peringatan ke – 70 tahun hubungan diplomatic Indonesia dan Thailand. Dengan adanya juga kerjasama untuk memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara tersebut.</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

Acara Pertunjukan
Sendratari
Ramayana Two
Nations One Dance

Kerjasama
Hubungan
Bilateral

Upaya yang
dilakukan
Indonesia dan
Thailand

